

Judul : Komisi VII tetapkan sembilan kandidat
Tanggal : Sabtu, 03 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Uji Calon Komite BPH Migas Komisi VII Tetapkan Sembilan Kandidat

KOMISI VII DPR telah merampungkan *fit and proper test* calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Periode 2021-2025. Setelah melakukan uji kepatutan terhadap 18 calon secara maraton, Komisi Bidang Energi dan Perindustrian ini akhirnya menetapkan 9 nama.

"Uji kepatutan dan kelayakan untuk calon ketua dan anggota Komite BPH Migas telah rampung dan sudah ada nama-nama komite BPH Migas yang baru," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Ada pun anggota Komite BPH Migas yang terpilih, yakni Abdul Halim, Basuki Trihora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasertya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas dan Yapit Sapta Putra. Sementara untuk posisi ketua disepakati Erika Retnowati.

"Ini sejarah baru, pertama kalinya BPH Migas dipimpin sosok perempuan. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas perempuan pertama," sambung Eddy.

Eddy pun berpesan agar Komite BPH yang terpilih menuntaskan persoalan-persoalan besar di sektor hilir migas. Antara lain, mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi dan mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T, terdepan, terpendak, tertinggal.

Pejabat baru BPH Migas juga diminta mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan penggunaan BBM berkualitas. Berkontribusi dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan kesembilan nama Komite

dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat pengesahan kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik.

"Harapan kami dari Komisi VII DPR terhadap BPH Migas ke depannya dapat semakin maksimal bekerja dan menjawab isu-isu tersebut," tambah politisi PAN ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menegaskan, proses *fit and proper test* sudah berjalan konstitusional. Pernyataan tersebut disampaikan politisi Golkar merespons protes dari Forum Karyawan SKK Migas yang mempertanyakan legalitas dan kompetensi dari para calon Komisioner BPH Migas.

"Dari DPR tidak akan mungkin menjalankan *fit and proper test* kalau kita anggap tidak legal. Artinya, proses legalisasi ini sudah berjalan dan sekarang masuk dalam proses politik di DPR untuk mengkerucutkan dari 18 nama menjadi 9 nama," tegas Maman.

Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika juga berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih nantinya dapat membangun sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Komunikasi yang kurang padu harus bisa dirajut dengan baik.

Menurutnya, hubungan antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas saat ini pada titik nadir. Artinya, komunikasi tidak terjadi, lalu bersahutsahutan dan sebagainya.

"Saya berharap Anda kalau terpilih, itu tugas Anda. Sebagai mantan orang Kementerian ESDM yang nanti jadi komite, maka tidak ada lagi itu ketidakharmonisan. Supaya Anda kalau terpilih, hal-hal semacam itu bisa terselesaikan dan Komisi VII DPR diperhatikan," ujar politisi Partai